

KONSEPSI DAN AKSI SINERGI PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH DAERAH, DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

* Surya Dharma

**Husaini Usman

* E-mail: surya_pendik@yahoo.com, PPS FISIP Universitas Indonesia, Kampus UI Depok

**E-mail: usay@telkom.net, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang, Yogyakarta

Abstract: This article tries to contribute the ideas of concept and synergic action of universities, provincial government, and industries for preparing highly-qualified human resources to face APEC in 2020. None of universities in Indonesia is of the international standard. University graduates are not ready to work; they are just ready for training. The improvement of the nation's competitiveness needs concepts and synergic action of partnership among universities, provincial government, and industries, i.e. the mutually beneficial partnership with "together" principle. Many actions can be done by universities, provincial government, and industries.

Kata kunci: kemitraan, prinsip kemitraan, aksi kemitraan.

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tidak dapat dianggap remeh karena prediksi 15 tahun ke depan dalam bersaing dengan negara lain sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan yang bermutu memberikan sumbangan dalam menyediakan SDM yang bermutu. Sejarah Negara Matahari Terbit (Jepang) yang juga sudah diketahui Negara Matahari Terbenam (Indonesia) mencatat betapa penting pendidikan bagi suatu bangsa (Yanto, 2004). Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945, pertanyaan yang pertama kali muncul dari Perdana Menteri Jepang adalah, "berapa jumlah guru yang masih hidup"? Pertanyaan ini mengisyaratkan betapa penting pendidikan, khususnya guru dalam mendidik suatu bangsa. Setelah itu, Jepang segera mengirimkan warganya belajar ke luar negeri secara besar-besaran. Hasilnya, 35 tahun kemudian, Jepang merajai pasaran mobil dan elektronik dunia.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyelesaikan permasalahan yang besar pula. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mencatat keberhasilan dalam mengatasi berbagai kemelut permasalahan bangsa. Indonesia berhasil mengusir penjajah, meredam berbagai pemberontakan, keluar dari jatuh bangun pemerintahan yang berganti-ganti secara cepat dan sulit diramalkan, dan terakhir membunuh gembong teroris Dr. Azhari. Tetapi, sampai saat ini bangsa Indonesia belum dapat keluar dari masalah krisis mutu sumber daya manusia (SDM).

Bung Karno dan Pak Harto melupakan aspek pembangunan manusia. Politik adalah panglima orde lama dan stabilitas adalah panglima orde baru. Keduanya telah mengorbankan mutu SDM. Wajarlah jika hasil penelitian *Human Development Index* menemukan bahwa mutu SDM Indonesia terburuk di antara negara-negara Asean. Indonesia berada di peringkat 119 di antara 171 negara yang diteliti atau berada 64 peringkat di bawah Malaysia (Media Indonesia, 2005:1). Hasil riset menemukan bahwa dari 79 universitas yang diteliti ternyata UI ranking 70, UGM 67, Undip 77, dan Unair 79. Dari 39 institut teknik yang diteliti ternyata ITB ranking 21 di bawah Thailand, Malaysia, dan Filipina (Anonim, 1999). Hanya baru-baru ini saja yaitu pada awal November 2005, UGM dinyatakan berhasil masuk peringkat 56 dari 100 universitas unggulan dunia dalam bidang ilmu budaya dan humaniora dari 2.375 perguruan tinggi di seluruh dunia (Kedaulatan Rakyat, 2005).

Makna data di atas bagi Indonesia adalah berarti SDM Indonesia sudah kalah tujuh kosong di bidang ipteks dari Malaysia: (1) pada tahun 1970-1980-an; Malaysia mendatangkan dosen-dosen dan guru-guru terbaik dari Indonesia untuk mengajar di Malaysia, sementara itu, diam-diam Malaysia mengirim dosen-dosen dan guru-gurunya untuk belajar ke luar negeri termasuk Indonesia; (2) setelah mereka lulus dan kembali ke Malaysia, dosen-dosen dan guru-guru Indonesia dipulangkan dan kontraknya tidak dapat diperpanjang; (3) dulu orang Malaysia bangga

belajar ke Indonesia, sekarang sebaliknya, Indonesia bangga belajar ke Malaysia; (4) Malaysia sangat menghargai profesi guru dan guru mendapat gaji setinggi pejabatnya, Indonesia baru akan menghargai guru dengan disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen; (5) Malaysia unggul dengan perkebunan terutama kelapa sawit dengan orang Malaysia sebagai bosnya, sedangkan pekerjaannya sebagian besar dari Indonesia; (6) Malaysia mengimpor buah cokelat dari Indonesia dengan harga murah kemudian mengekspor produk olahan coklat ke Indonesia dengan harga mahal; dan (7) sekarang, mutu SDM Indonesia berada pada 25 peringkat di bawah Malaysia. Memang rasanya kurang adil membandingkan Indonesia dengan Malaysia karena penduduknya sedikit, dan pulaunya sedikit dan dekat-dekat. Tetapi, ada hikmah yang dapat diambil yaitu aksi politis dan semangat akademisnya dalam meningkatkan mutu SDM.

Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang miskin sumber daya alam (SDA) ternyata rakyatnya sejahtera karena mutu SDM-nya tinggi. Sebaliknya, Indonesia yang kaya SDA-nya tetapi rakyatnya sengsara karena mutu SDM-nya rendah. Sebagai contoh, di Kaltim, rakyat berama-ramai menjual tanahnya seharga lima ribu rupiah per meter kepada investor asing, sedangkan investor asing mampu menjual jutaan kubik batu bara dan minyak bumi yang terkandung di bawahnya trilyunan rupiah. Artinya, sumber daya alam akan habis, penduduknya tetap miskin, lingkungan semakin rusak; sedangkan investornya semakin kaya. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk miskin Indonesia mencapai 36,1 juta setara dengan keadaan 15 tahun yang lalu (1990), jadi telah terjadi kemunduran kesejahteraan rakyat yang luar biasa.

Daya saing bangsa Indonesia menurut penelitian *World Competitiveness Yearbook* (2003) menduduki rangking 45 dari 47 negara. Salah satu faktor pemeringkatan itu adalah mutu SDM-nya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak lulusan Perguruan Tinggi (PT) belum siap kerja tetapi baru siap latih. Perusahaan banyak yang mengeluh karena mutu lulusan PT belum memenuhi persyaratan dunia kerja meskipun lulusannya berpredikat *cum laude* sekalipun. Prestasi tinggi di PT ternyata bukan jaminan berprestasi tinggi pula di dunia kerja. Dunia kerja ternyata tidak hanya mementingkan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional termasuk cerdas bergaul dan berorganisasi. Akibatnya, dunia usaha enggan menerima lulusan PT dan akhirnya banyak lulusan PT yang menganggur (Sukartono, 2004). Menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka per Oktober 2005 sebanyak 11,6 juta orang

atau 10,84 persen dari angkatan kerja sebanyak 106,9 juta orang. Menurut Menakertrans (2005), tingkat pengangguran tidak mungkin dihentikan karena banyak faktor yang menyebabkannya. Tahun 2006 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka naik 1 sampai 2 (dua) persen dibandingkan dengan jumlah pengangguran tahun 2005.

Sylvia Dewayani (2004) menyatakan bahwa hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bukanlah jaminan sukses di dunia kerja. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, setelah lulus cenderung lebih cakap dalam karirnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Lodi Paat (2006) menyatakan bahwa banyak mahasiswa memperoleh nilai A, tetapi gagal menjadi pekerja yang baik.

Masalahnya adalah, "Bagaimana mengurangi kesenjangan antara lulusan PT dengan dunia usaha/industri (DU/I) yang difasilitasi pemerintah daerah (pemda) melalui kemitraan yang sinergi?"

Mutu dosen mempunyai peranan kunci, yang ditransfer bukan hanya ilmu tetapi juga karakter. Menurut Satrio Sumantri Brojonegoro (2001), dalam benak mahasiswa ada dua target utama yaitu memenuhi target satuan kredit semester (sks) agar segera menyelesaikan kesarjanaannya, dan mendapatkan pekerjaan. Namun, lulusan masih kurang dibekali kepemimpinan dan kewiraswastaan sehingga hanya menghasilkan lulusan yang *to have* bukan *to be* yaitu sarjana yang ingin meraih kekayaan sebanyak mungkin kurang diimbangi semangat mencipta apalagi mengabdikan untuk kepentingan umat manusia. Semangat mencipta memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).

Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab ketertinggalan negara Indonesia dari negara-negara Asean dalam ipteks. Aksi antisipasi belum juga dilakukan antara lain karena belum dikembangkannya pendidikan berkelanjutan atau pendidikan sepanjang hayat sebagai hasil kemitraan PT, pemda, dan dunia usaha/industri (DU/I). Untuk mengurangi ketergantungan terhadap ipteks luar negeri, peran PT sangat penting. Model-model pendidikan dapat dikembangkan oleh PT bermitra dengan pemda dan DU/I untuk mengejar ketertinggalan negara Indonesia dari negara-negara tetangga. Oleh sebab itu, mutu SDM harus ditingkatkan menyongsong persaingan pasar bebas APEC tahun 2020 nanti. Pada tahun 2020 nanti, SDM asing yang bermutu tinggi dengan bebas bekerja di Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan mutu mereka, maka bersiap-siaplah menjadi kuli di negara sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, ma-

ka perlu konsepsi dan aksi sinergi PT, pemda, dan DU/I yang jelas dan operasional dalam rangka menyiapkan SDM bermutu tinggi menyongsong pasar bebas APEC 2020 melalui konsep dan aksi kemitraan tridharma PT.

Tujuan penulisan ini adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang konsepsi dan aksi kemitraan sinergi PT, pemda, dan DU/I dalam rangka menyiapkan mutu SDM berkualitas tinggi pada tahun 2020 yang akan datang.

Saat ini, dunia sedang menghadapi tantangan berat yang merupakan dampak kumulatif globalisasi. Berbagai masalah sebagai dampak globalisasi hanya dapat di atasi dengan solusi berbasis ipteks (Depdiknas, 2001). Kemampuan bersaing mengatasi berbagai masalah akan membuahkan keuntungan pemenangnya. Oleh sebab itu, daya saing suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang menghasilkan produk dan jasa berkelas internasional. Tantangan yang mengutamakan semakin pentingnya ipteks sebagai pendorong utama pertumbuhan suatu bangsa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Daya saing bangsa tidak lagi tergantung SDA dan tenaga SDM yang murah, tetapi semakin bergantung pada ipteks yang dimiliki suatu bangsa. Dengan ipteks dapat memudahkan proses dan menaikkan nilai tambah SDA sebelum dijual ke pasar global. Tanpa ipteks dan imtaq yang memadai, SDM hanya menambah beban nasional dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, kebijakan PT saat ini ialah meningkatkan daya saing, otonomi, dan kesehatan organisasi.

Konsep Kemitraan

Hampir semua ahli pendidikan sependapat bahwa untuk meningkatkan mutu PT membutuhkan kemitraan PT, pemda, dan DU/I yang saling menguntungkan (Decker & Decker, 2003). Pemda dan DU/I sangat mengharapkan peran PT sebagai penyelesai masalah. Namun, saat ini masih sulit mengharapkan peran tersebut berfungsi secara optimal. Bahkan PT masih sering dianggap bagian dari permasalahan mereka (pemda dan DU/I) karena PT belum mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi. PT sendiri masih menghadapi masalah manajemen internalnya seperti rendahnya mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), rendahnya motivasi belajar mahasiswa, rendahnya motivasi mengajar dosen, rendahnya riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang semuanya bermuara pada rendahnya mutu lulusannya.

Sinergi ialah kekuatan berkerja bersama-sama hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan be-

kerja sendiri-sendiri. Agar dapat bermitra dan beraksi secara sinergis digunakan prinsip TEAMWORK baik dalam arti sesungguhnya maupun dalam arti singkatan. TEAMWORK dalam arti singkatan adalah *Together* (bersama-sama), *Empathy* (dapat merasakan perasaan orang lain), *Assist* (membantu), *Maturity* (dewasa), *Willingness* (kemauan), *Organization* (penataan), *Respect* (hormat), dan *Kindness* (baik hati) (Sihombing, 2001).

PEMBAHASAN

Terdapat PT yang melakukan kemitraan dengan pemda dan DU/I, tetapi pada umumnya masih dalam keadaan tidak setara. PT cenderung sebagai penerima manfaat; sebaliknya, pemda dan DU/I sebagai pemberi manfaat. Seharusnya, ada keseimbangan saling memberi dan menerima (Ditjen Dikti, 2003).

Pemda merupakan aktor penting yang mengurusi masalah pendidikan. Salah satu konsep penting adalah penggunaan teknologi informasi (TI) ke dalam PBM. Pengintegrasian komputer dan jaringan internet ke PBM memiliki manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa dan dosen. Materi belajar di komputer ini dapat meringankan tugas mahasiswa dan dosen. Telkom belum memberikan tarif khusus untuk kemajuan pendidikan.

Pemda dan DU/I belum mengembangkan kerjasama yang baik dengan PT untuk menangani masalah-masalah yang timbul di masyarakat melalui riset. Pada hal manfaatnya sangat dinantikan oleh masyarakat. Pemda dan DU/I belum optimal dalam mengembangkan program-program pelatihan dan magang sehingga lulusan tidak kaku setelah terjun ke dunia kerja, dan belum melibatkan diri dalam pengembangan kurikulum dan topik-topik riset (Ditjen Dikti, 2003).

Bagi PTN, investasi fasilitas termasuk TI dan SDM sepenuhnya bersumber dari dana pemerintah. Tetapi, dengan kondisi keuangan pemerintah yang semakin sulit dari tahun ke tahun, pemerintah ingin membadanhukumkan seluruh lembaga pendidikan. Dalam hal ini, kontribusi masyarakat untuk membantu lembaga pendidikan menjadi suatu alternatif yang sangat diharapkan melalui kemitraan yang saling menguntungkan (Ditjen Dikti, 2003). PT memerlukan dukungan dana dan fasilitas lainnya sementara pemda dan DU/I membutuhkan produk PT baik berupa lulusan yang bermutu tinggi maupun hasil riset dan pengabdian masyarakat yang sesuai kebutuhan nyata mereka.

Dalam konteks persaingan global, PT tidak lagi sekedar berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, tetapi juga menjadi pusat unggulan

(*center of excellence*) yang mampu menciptakan ipteks. Meskipun masyarakat PT meyakini bahwa PT merupakan hal yang sangat penting masyarakat dalam masyarakat yang beripteks, namun banyak pihak menganggap bahwa peran PT belum signifikan dan tidak jelas posisinya dalam meningkatkan daya saing bangsa. Persentase lulusannya banyak yang menggugur, dan hasil-hasil risetnya belum banyak dimanfaatkan pemda dan DU/I. Oleh sebab itu, posisi PT berada dalam prioritas rendah dalam pendanaan dan kebijakan publik (Ditjen Dikti, 2003).

Penggalangan dana yang diusahakan PT tanpa meninggalkan visi dan misinya harus mendapat dukungan berbagai pihak terutama pemda dan DU/I. PT di sisi lain harus mampu menunjukkan akuntabilitas publik yang sesuai untuk memelihara kredibilitasnya sebagai institusi nirlaba dan tumpuan masyarakat dalam menyongsong pasar global APEC 2020 nanti (Ditjen Dikti, 2003).

PT diharapkan menguntungkan pemda dan masyarakat dengan cara menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, produk riset dan karya yang mampu berbicara sepadan di pergaulan dunia. Untuk maksud itu, PT harus mengembangkan pendidikan yang bermutu dengan lulusan yang tidak saja memiliki kompetensi di bidangnya tetapi juga bekal hidup dalam masyarakat ipteks yang penuh persaingan seperti kemampuan berkomunikasi terutama bahasa Inggris, belajar sepanjang hayat, integritas pribadi, bermoral tinggi, etika profesi, dan dapat menemukan dan menggunakan *high tech* dan *high touch*. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sangat diperlukan karena informasi itu umumnya disimpan, dikomunikasikan, dan disebarluaskan dalam bahasa Inggris. Sekitar 85 persen percakapan telepon internasional dilakukan dalam bahasa Inggris, demikian pula sekitar 75 persen surat, teleks, dan telegram dalam bahasa Inggris. Perintah-perintah program komputer dan *software* komputer sendiri hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Bangsa yang tidak mau ketinggalan harus menyiapkan SDM-nya yang berdaya saing tinggi dan mampu berbahasa Inggris (Afriazi, 2000).

Untuk menghadapi kondisi yang cepat berubah dan sulit diramalkan, lulusan juga harus dibekali kemampuan beradaptasi dengan ipteks yang ada di DU/I, memiliki rasa percaya diri yang kuat, memiliki kearifan terhadap nilai-nilai sosial-kultural bangsa (multikultur), kemandirian, demokratis, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. PT juga harus dapat melahirkan kepemimpinan akademik, pembaharu pendidikan dengan reputasi ilmiah yang hebat, mampu menciptakan kesempatan luas bagi institusi untuk berkembang secara terus-menerus serta mempunyai

jiwa kewiraswastaan yang memadai (Ditjen Dikti, 2003). Dengan memiliki jiwa kewiraswastaan yang memadai, lulusan PT diharapkan bukan sebagai pencari kerja tetapi menjadi pencipta lapangan kerja. Dengan demikian, pengangguran PT dapat dikurangi.

Riset di PT pada umumnya berhenti pada laporan akhir, dimasukkan perpustakaan atau hanya disimpan di laci-laci meja peneliti. Tidak dipublikasikan sehingga pengguna tidak mengetahuinya, apalagi menerapkannya. Akibatnya, penerapan hasil penelitian kurang dirasakan oleh masyarakat luas. DU/I terjebak logika pasar dan arus kapitalis. Selama hasil penelitian tidak memberikan untung yang sangat besar, selama itu pula tidak diterapkan. Cina dan India melakukan riset obat-obatan sehingga kampusnya bermanfaat bagi masyarakatnya.

Di Indonesia, budaya meneliti di kampus belum berkembang optimal. Budaya tulis belum mampu menggeser budaya lisan karena itu publikasi ilmiah masih sedikit. Masalahnya berputar-putar pada masalah klasik yaitu keterbatasan dana. Minimnya dana berujung pada rendahnya penghargaan terhadap riset. Di ITB, diduga karena rata-rata gaji dosen dua juta rupiah/bulan, mayoritas dosen malas meneliti dan mereka lebih banyak mencari pekerjaan sampingan di luar (Kompas, 2005).

PT juga diharapkan menghasilkan riset yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pemda dan DU/I. Hasil riset seharusnya ditulis di jurnal lokal, nasional, dan internasional. Tetapi, karena keterbatasan dana, maka diperlukan kesungguhan PT menerapkan prioritas riset pada keunggulan khususnya. Banyak negara sangat sukses karena memperkaya ipteknya dengan ciri khas sehingga menjadi sangat unggul dalam persaingan global sebab menjadi sangat khas tidak dapat disaingi negara lain. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu PT baik karena faktor geografis maupun kemampuan meneliti belum berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa karena kemitraan dengan pemda dan DU/I belum terbentuk secara jelas dan sinergi. Di sisi lain, kelemahan dalam meningkatkan kemampuan dan mutu riset karena terbatasnya dana dan penghargaan terhadap hasil riset. Oleh sebab itu, kemitraan dengan DU/I sesuai UU No. 18 Tahun 2002, komitmen pemda mengembangkan riset dengan sistem hibah bersaing serta kemampuan PT memunculkan keunikan dan keunggulan geografis perlu ditumbuhkembangkan.

Satrio Sumantri Brojonegoro (2001) menyatakan bahwa tuntutan di bidang SDM sebagai akibat globalisasi 2020 adalah dibutuhkan kapasitas penelitian dan pengembangan bagi pengembangan

produk-produk baru dan internalisasi teknologi baru ke dalam proses produk untuk meningkatkan daya saing produk industri. Seperti yang terjadi di banyak negara berkembang, di Indonesia, industri merupakan tempat yang paling tinggi kecenderungannya untuk menjadi gerbang bagi masuknya teknologi baru. Berdasarkan pemikiran ini, PT (lembaga penelitian), pemda, dan DU/I berpotensi menjadi segitiga sinergis melakukan aksi transfer, internalisasi, dan pengembangan ipteks sangat strategis meningkatkan daya saing. Dengan demikian, penelitian sangat penting peranannya di era global 2020.

Kegiatan riset di PT berimplikasi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan terutama bahan kuliah, menunjang pengembangan keilmuan (*body of knowledge*), mendorong pengembangan DU/I, membantu memecahkan masalah pemda dan masyarakat, membangun percaya diri, dan menciptakan kaderisasi peneliti-peneliti baru yang handal. Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu otonomi dan kesehatan organisasi. Menurut Ditjen Dikti (2003), ada tiga konsep strategi kebijakan dasar PT jangka panjang yaitu (1) daya saing bangsa, (2) otonomi penyelenggaraan PT, dan (3) kesehatan organisasi.

Daya Saing Bangsa

Mutu PT ditentukan oleh PT sendiri secara mandiri melalui pelaksanaan *internal quality assurance* dan *quality assurance management* dan dipertanggungjawabkan pada pelanggan. Untuk melaksanakannya diperlukan sikap mental: (1) utamakan mutu, (2) kepuasan pelanggan, (3) proses selanjutnya juga pada kepuasan pelanggan, (4) bicara dengan data, dan (5) semua keputusan secara partisipatif.

Ciri-ciri PT sudah bermutu tinggi adalah (1) mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui misi, (2) mampu memenuhi pelanggannya berupa kebutuhan masyarakat, DU/I, dan profesional (Ditjen Dikti, 2003). Untuk meningkatkan daya saing, maka PT perlu ada penjaminan mutu (*quality assurance*). Jadi, suatu organisasi yang sehat pasti telah menerapkan pemikiran tentang mutu dan penjaminan mutu.

Di Inggris, tuntutan penjaminan mutu muncul karena masyarakat menuntut akuntabilitas PT atas dana masyarakat yang telah diserap. Penjaminan mutu PT ialah program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu secara terus-menerus dan sistematis terhadap pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu perlu ada kerangka organisasi yang mewadahnya serta mekanismenya. Landasan yuridisnya adalah UU No.20 Tahun 2003 pasal 1, evaluasi pendidikan terdiri atas kegiatan

pengendalian dan penjaminan dan penetapan mutu. Ditjen Dikti (2003) merumuskan bahwa tujuan *capacity building* melalui penciptaan kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat harus melakukan penjaminan mutu. Penetapan standar akademik (*benchmarking*) dan penjaminan mutu merupakan otoritas PT. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh jurusan/prodi, fakultas, dan universitas secara terintegrasi yang semuanya melekat pada unsur pimpinan masing-masing. Penjaminan mutu meliputi internal dan eksternal. Mutu internal adalah peningkatan terus-menerus melalui monitoring dan evaluasi diri serta audit internal. Mutu eksternal terkait dengan citra lembaga akreditasi. Program aksi pengembangan harus dirancang untuk memberikan motivasi melalui ganjaran dan sanksi bagi tumbuhnya kapasitas organisasi dalam rangka otonomi.

Daya saing lemah karena menurut Koentjaraningrat (2004) orang senang meremehkan mutu. Di samping itu, menurut pengamatan lapangan daya saing bangsa lemah antara lain karena (1) mutu tenaga kerja rendah (kemampuan rendah), (2) etos kerja (kemauan) juga rendah, (3) sering bekerja di luar bidang keahliannya (hampir semua bidang pekerjaan yang ditawarkan disanggupi, karena kalau bilang tidak merasa malu), (4) sering menghasilkan unjuk dan hasil kerja di bawah kemampuannya, dan (5) kesenjangan upah tenaga kerja antara pemerintah dan swasta dapat menurunkan etos kerja.

Peningkatan daya saing bangsa hanya mungkin jika Indonesia memiliki SDM bermutu setara dengan negara lain. Untuk itu, kemampuan dosen harus ditingkatkan sehingga 2010 nanti para dosen mampu: (1) memberi kuliah dalam bahasa Inggris, (2) menggunakan internet sebagai sumber ipteks, (3) memberi kuliah dengan metode dan media yang cocok, dan (4) melakukan penelitian di bidangnya (Ditjen Dikti, 2003). Lebih lengkapnya, setiap guru dan dosen harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Ada pertanyaan yang sangat menarik dan berkesan, yakni, "Mengapa bangsa-bangsa Asean lain maju, sedangkan bangsa Indonesia masih miskin dan bodoh serta ketinggalan dalam banyak hal?". Menjawab pertanyaan ini tidak akan habis-habisnya. Jawabannya banyak diperdebatkan para ahli. Menurut MT Zen (2005), ciri-ciri sebagai prasyarat untuk maju, sejahtera, dan sukses adalah (1) berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kuat, (2) berdisiplin tinggi, (3) bertanggung jawab, (4) menghormati hukum dan peraturan, (5) menghargai hak warga lain, (6) senang bekerja keras ("kerja itu mulia"), (7) bekerja keras untuk dapat menabung dan berinvestasi, (8) berkemauan untuk bertindak hebat,

(9) menghargai waktu, dan (10) betul-betul memanfaatkan sains dan teknologi.

Salah satu kebiasaan yang sangat perlu dipupuk sejak kecil adalah kebiasaan menabung. Ketika krisis moneter menimpa negara Asia tahun 1997, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan cepat bangkit kembali karena mereka mempunyai tabungan yang banyak. Bangsa Indonesia tidak dapat menabung dengan alasan masih miskin. Untuk makan saja susah, apa yang dapat ditabung?

India seperti halnya China akan menjadi kekuatan utama ekonomi dunia karena telah melakukan kebijakan yang tepat yaitu *human investment*. Korea Selatan pernah luluh lantak se usai perang Korea, kini tampil gagah di serambi bangsa-bangsa maju. Rahasiannya adalah budaya kerja keras, disiplin, berhemat, menabung, dan mengutamakan pendidikan.

Kompetensi tamatan pendidikan yang diharapkan menurut deklarasi yang dirumuskan oleh para menteri pendidikan sembilan negara berpenduduk terbesar di New Delhi seperti yang dikutip M. Slamet (1998) dari Unesco, (1995) adalah (1) ikut menggalang perdamaian dan ketertiban dunia, (2) mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan masyarakat, (3) pendidikan yang merata dan menyeluruh, (4) menanamkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (5) mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi sehingga pendidikan perlu dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, dan (6) berorientasi pada penguasaan dan pengembangan ipteks.

Deklarasi di atas berlaku pula bagi Indonesia, mengingat penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar nomor 4 di dunia yaitu dengan jumlah 220 juta jiwa, setelah China, Amerika Serikat, dan India.

Tujuh kompetensi umum yang diperlukan DU/I menurut yang dirumuskan oleh negara-negara maju (Amerika, Inggris, Australia, dan Selandia Baru) seperti yang dikutip M. Slamet (1998) adalah (1) kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi; (2) kemampuan untuk berkomunikasi; (3) kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan; (4) kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam suatu tim kerja; (5) kemampuan untuk mempergunakan teknik dan logika matematika; (6) kemampuan untuk memecahkan masalah; dan (7) kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

Dari kedua rumusan di atas, terdapat kesamaan rumusan yaitu berorientasi pada penguasaan dan pengembangan ipteks sejalan dengan kemampuan memanfaatkan teknologi. Perbedaannya, ru-

musan kedua lebih spesifik ke dunia kerja yaitu pentingnya menyiapkan lulusan yang menguasai informasi, mampu berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi.

Otonomi Penyelenggaraan PT

Dalam sistem badan hukum pendidikan, status dosen dianggap sebagai pegawai PT bersangkutan sehingga kriteria dosen dikorelasikan dengan kemampuan pedagogik dosen dalam penguasaan materi kuliah, pemaparan *road map* kurikulum, kemampuan mendidik dan mengajar dan kemampuan menggalang dana masyarakat dari riset dan pengabdian kepada masyarakat. Otonomi pengelolaan dosen PT menjadi lebih fleksibel di mana kompensasi yang diterima diperhitungkan dengan jabatan setara di pasar kerja bukan pada PNS. Akan tetapi, otonomi PT dalam penggalangan dana harus dimbangi laporan akuntabilitasnya secara transparan kepada masyarakat sehingga melahirkan hubungan saling percaya dengan mitra PT. Dengan otonomi yang utuh dan akuntabilitas yang tinggi, PT akan menjadi organisasi yang sehat.

Indonesia merupakan negara kelautan dengan 13.000 lebih pulau, lebih 800 kelompok budaya, dengan jarak Sabang-Merauke lebih dari 15.000 km. Pendekatan yang sangat sentralistis terbukti tidak mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Oleh sebab itu, desentralisasi otoritas dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada PTN merupakan pilihan yang paling tepat bagi negara Indonesia. Dengan otonomi luas, setiap PTN diharapkan akan mampu mengembangkan dirinya sesuai konteksnya, dan memberi sumbangan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Tujuan otonomi di bidang pendidikan adalah untuk (1) mengemban misinya dengan baik (efisien dan sehat); (2) menggunakan dana berdasarkan kinerja; (3) mendorong efisiensi dan keunggulan; (4) memudahkan pengembangan pendidikan, program, penelitian, dan pelayanan masyarakat lebih fungsional; (5) meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, cepat, mudah, murah, dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menekankan pada prinsip-prinsip: demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa (memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah), sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Otonomi merupakan prasyarat dasar bagi PT untuk mengelola dan mengembangkan perannya secara optimal. Saat ini PTN dan PTS banyak yang tidak memiliki status badan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan hukum. Karena status ter-

sebut, PT sebenarnya tidak memiliki otonomi karena tidak dapat menjalankan yang ditetapkan badan hukum. Agar PT dapat mengemban visi dan misinya secara efektif dan efisien, otonomi dan kemandirian menjadi keniscayaan. Dalam sistem otonomi, pendanaan akan lebih didasarkan pada kinerja dan mendorong terciptanya efisiensi dan keunggulan. Dengan otonomi yang utuh PT lebih mudah mengembangkan tridharmanya secara lebih fungsional dan tidak terjebak pada formalisme semu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akreditasi PT dapat diminta kepada lembaga akreditasi nasional atau internasional sehingga PT memiliki otonomi dalam memilih cara menjamin mutunya untuk dipertanggungjawabkan kepada mitranya.

Meskipun masih terbatas, PT sudah memiliki hak otonomi dalam kebebasan mimbar akademik dan menentukan karakter profesionalisme masyarakat akademik. Kebebasan yang menuntut sikap kritis sivitas akademika adalah ciri eksklusif masyarakat kampus. Otonomi bertindak tidak berarti kebebasan dalam semua aspek tetapi lebih berfokus pada kemandirian berlandaskan produktivitas PT.

Otonomi penyelenggaraan PT selama ini tampaknya lebih cenderung mengutamakan pembangunan fisik kampus yang megah dan mewah sehingga biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa menjadi mahal karena sebagian besar uang yang masuk untuk membangun gedung bukan untuk melengkapi fasilitas belajar minimal dan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Jika kita belajar dari India, Jepang, dan Cina; maka kampus mereka tampak sederhana saja tetapi fasilitas belajar mengajar dan kesejahteraan dosennya terjamin. Penampilan luar fisik demi gengsi dari pada isi substantif untuk menunjang peningkatan mutu proses belajar mengajar di dalam gedung itu lebih diutamakan.

Berdasarkan konsep di atas, otonomi yang luas kepada PT dapat menjadikan PT berinisiatif membuat program-program pengembangan sesuai prioritas kebutuhannya. Akan tetapi, otonomi PT dalam pengelolaan dana, SDM, dan sumber lainnya harus diimbangi dengan meningkatnya tanggung jawab dan dilaporkan secara benar dan transparan. Otonomi PT hanya dapat dilaksanakan jika setiap PTN memiliki manajemen internal dan kesehatan organisasi.

Kesehatan Organisasi

Tanpa kesehatan organisasi yang memenuhi syarat, otonomi PT akan menimbulkan anarki dan kebingungan dalam pelaksanaannya. Sentralisasi berlebihan selama ini ternyata mematikan kreativitas, menunggu perintah (pasif), masa bodoh (tidak peduli), apatis, tidak kreatif dan inovatif di tingkat

pelaksana. Tidak mengherankan bila kesehatan organisasi PT masih belum memadai karena daya saing hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang sehat. Suatu organisasi yang memiliki manajemen internal dan organisasi yang sehat akan mampu meningkatkan daya saingnya di antara sesama PT di tingkat nasional yang merupakan cikal bakal bagi penumbuhan kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada daya saing bangsa.

Kesehatan organisasi merupakan unsur penting bagi PT agar dapat menjalankan visi dan misinya secara efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pada peningkatan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan organisasi yang sehat, PT harus dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance*. Organisasi yang sehat bukan satu-satunya syarat untuk mewujudkan PT bermutu tinggi, tetapi sebagai syarat utama terciptanya PT yang bermutu tinggi.

Ciri-ciri organisasi yang sehat menurut (Ditjen Dikti, 2003) adalah (1) berkembangnya kebebasan akademik; (2) terciptanya suasana akademik yang mendorong proses penelitian, inovasi, kreativitas, dan pemunculan ide-ide setiap individu; (3) berkembangnya sistem nilai, norma, tata tertib, dan operasi standar lainnya yang memungkinkan *team building* dan *team spirit* sehingga memungkinkan seseorang atau kelompok untuk produktif secara maksimal; (4) berlakunya prinsip meritokrasi dengan baik sehingga setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras dan meraih keunggulan; (5) berkembangnya kemampuan memasarkan dan menjual ide-ide yang berkembang dari kegiatan penelitian; (6) berkembangnya kemampuan untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan di dalam dan di luar PT; dan (7) terlaksananya akuntabilitas keuangan. Sebenarnya ada satu lagi indikator yang menunjukkan bahwa organisasi PT itu sehat yaitu menunjuk dan menugaskan dosen bukan karena kedekatan atau untuk kepentingan kelompoknya saja tetapi benar-benar atas dasar profesionalisme, yaitu memilih dan menugaskan dosen benar-benar sesuai dengan bidang keahliannya. Pendidikan tidak akan maju dan berkualitas selama penugasan dosen di luar bidang keahliannya atau tidak profesional.

Keinginan untuk meningkatkan kesehatan organisasi dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan kinerja organisasi harus timbul dari dalam organisasi itu sendiri.

Aksi Sinergi PT, Pemda, dan DU/I

Aksi yang dapat dilakukan PT antara lain adalah (1) melaksanakan jaringan kemitraan yang kuat

dengan pemda dan DU/I dengan prinsip TOGETHER terutama termasuk Program Magang, *English* dan komputer untuk analisis data; melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya pasal 19 sampai 25; (2) menyelenggarakan pendidikan yang menyentuh empat pilar: *learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together*; (3) melakukan regenerasi kepemimpinan yang kuat dengan memprogramkan Peningkatan Pertumbuhan Kepemimpinan Bermutu (PPKB) yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual melalui diklat kepemimpinan; (4) meningkatkan mutu PBM, dosen-dosen harus bersertifikat sehingga mampu menciptakan suasana *pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan aman* (PAIKEMA); (5) berlangganan jurnal elektronik untuk menunjang PBM dan penelitian; (6) meningkatkan budaya meneliti dosen dengan mahasiswanya melalui program inovatif hibah bersaing dengan penghargaan yang memadai, meneliti bagian dari hidupnya; (7) meningkatkan keterampilan meneliti terutama bagi dosen melalui diklat metodologi penelitian dan diklat statistik untuk menganalisis data; (8) meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berdebat di forum ilmiah dan komunikasi tertulis melalui diklat keterampilan penulisan ilmiah; (9) menuliskan hasil penelitian di jurnal ilmiah jurusan atau fakultas dan media massa sehingga hasilnya diketahui ilmuwan, pemda, dan DU/I serta akhirnya bernilai ekonomis; (10) membenahi diri agar untuk segera menjadi *University of Reseach* (UR) dan *Teaching Based Research* bagi universitas eks IKIP, untuk maksud itu perlu pembenahan sarana, prasarana, dan budaya ilmiah; (11) UR yang menyediakan ladang subur media penelitian, suburnya ladang ditandai adanya akses informasi yang cepat, kesempatan penelitian terbuka lebar dalam persaingan sehat, penyediaan biaya penelitian kemitraan, serta sarana pendukung lain terutama laboratorium; (12) meyakinkan pemda dan DU/I secara proaktif bahwa PT benar-benar mampu meneliti dengan hasil sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah mereka, dan libatkan dalam membuat topik; (13) menjadikan hasil yang dapat memberikan umpan balik pada peningkatan mutu pendidikan, menunjang pengembangan keilmuan, mendorong pengembangan DU/I, dan mampu memecahkan permasalahan di masyarakat; (14) menjadi *trendsetter*, dapat mengarahkan lulusannya menjadi tokoh-tokoh yang akan mengembangkan jiwa kepemimpinan secara sistematis sebagai bekal untuk mengusahakan kemakmuran, keamanan dan kesra masyarakat yang kelak menduduki posisi penting; (15) memfasilitasi penerbitan *textbooks* dan buku ilmiah populer untuk

umum dari dosen untuk mengharumkan nama PT dan nama dosen; (16) membentuk kantor penjaminan mutu, aksi nyata penjaminan mutu dilakukan bertahap mulai dari konsolidasi, persiapan organisasi, sistem penjaminan mutu, sistem audit akademis internal, penyusunan indikator kinerja prodi, konsep akademisnya; (17) meningkatkan otonomi yang diawali dengan evaluasi diri untuk mengenal *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT)-nya, mengidentifikasi masalah, menyusun program untuk menyelesaikan masalah; (18) melaksanakan *workshop* evaluasi diri dan reflektif di setiap fakultas yang diikuti perwakilan mahasiswa; (19) menggalang dana untuk menjamin; (20) meningkatkan partisipasi seluruh sivitas akademik dalam rangka mencapai tujuan PT, partisipasi akan memupuk: manusia merasa dihargai, menyamakan visi, misi, strategi, rasa memiliki, rasa turut bertanggungjawab, dan tumbuhnya kontrol internal serta suasana akademik yang PAIKEMA; (21) mengadakan majelis wali amanah sebagai wakil *stakeholders*; (22) membuat laporan akuntabilitas yang transparan dan bermutu tinggi; (23) meluluskan insan yang dibutuhkan dunia kerja yaitu mampu: mengumpulkan, dan mengolah informasi, berkomunikasi, mengelola diri sendiri dan orang lain, bekerjasama dalam tim kerja yang solid, menggunakan logika matematik dan nonmatematik, memecahkan masalah, dan memanfaatkan ipteks, (24) mengurangi jumlah mata kuliah yang ada tetapi meningkatkan kualitas substantif mata kuliah yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan dan penghidupannya di masa depan. Penguasaan ipteks merupakan salah satu faktor utama untuk mampu bersaing. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menjadikan SDM Indonesia menguasai ipteks (Suhendro, 2004).

Aksi yang dapat dilakukan pemda antara lain adalah (1) melaksanakan jaringan kemitraan yang kuat dengan PT dan DU/I dengan prinsip TOGETHER, (2) melaksanakan UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 10 dan 11, (3) memantau pelaksanaan UU N0. 18 Tahun 2002 dan memberi sanksi tegas atas pelanggarannya, (4) memfasilitasi PT sesuai kemampuan dana yang ada, (5) melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang pendidikan tinggi, (6) memberikan insentif pajak kepada dunia usaha/industri (DU/I) yang melakukan kerjasama penelitian dengan PT, (7) melaksanakan peran masing-masing dinas/badan masing-masing dengan sebaik-baiknya; (8) memfasilitasi dan mengontrol pelaksanaan kemitraan, (9) menampung lulusan bermutu sesuai kompetensinya berdasarkan formasi PNS, (10) menilai pertanggungjawaban PT, (11)

memberi kompensasi pengurangan beban pajak DU/I dan menghimbau keikutsertaan DU/I sesuai UU No.18 Tahun 2002.

Aksi yang dapat dilakukan DU/I antara lain adalah (1) melaksanakan jaringan kemitraan yang kuat dengan PT dan pemda dengan prinsip TOGETHER, (2) melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 54 sampai 56, (3) melaksanakan UU No. 18 Tahun 2002, (4) mendukung terwujudnya masyarakat belajar (motivasi belajar), masyarakat peneliti, dan pengabdian, (5) memberikan kesempatan untuk magang dan penelitian mahasiswa, (6) melakukan diskusi topik-topik penelitian bersama-sama dengan pemda dan PT secara efektif dan berkelanjutan, demikian pula dalam menyusun kurikulum dan topik-topik mata kuliah, (7) memfasilitasi PT dengan menjadi sponsor dan donatur tetap PT, (8) memfasilitasi PT untuk menerbitkan

textbooks dan karya ilmiah populer dengan saling menguntungkan, (8) mendukung lulusan sebagai wiraswasta handal, (9) menampung lulusan bermutu sesuai kompetensinya berdasarkan kebutuhan DU/I, (10) menjadi wali amanah, dan (11) mengontrol dan menilai pertanggungjawaban PT.

KESIMPULAN

Konsepsi untuk menyiapkan SDM bermutu tinggi menyongsong persaingan global *APEC* 2020 nanti adalah kemitraan saling menguntungkan antar PT, pemda, dan DU/I dengan menerapkan prinsip TOGETHER. Aksi yang dilakukan PT, pemda, dan DU/I harus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sekurang-kurangnya ada 25 aksi yang dapat dilakukan PT, 11 aksi yang dapat dilakukan pemda, dan 10 aksi yang dapat dilakukan DU/I.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriazi, R. 2000. Pembelajaran Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad XXI. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7 (1): 1-12.
- Anonim. 1999. *About the Rankings: The 1999 Asia's Best Universities List Criteria, plus Other Notes*, (Online), (<http://www.partfinder.com/asiaweek/universities/about.html>, diakses tgl. 18 Januari 2000).
- Brojonegoro, S.S.. 2001. Implementasi Paradigma Baru di Perguruan Tinggi. Dalam P. Jalal & D. Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (hlm. 365-374). Yogyakarta: Adicita.
- Decker, L.E. & Decker, V.A. 2003. *Home, School, and Community Partnership*. Linham, Maryland, Oxford: The Scarecrow Press, Inc.
- Depdiknas. 2001. *Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen.
- Dewayani, S. 3 Juli, 2004. Pengembangan Kualitas Lulusan UGM. *Kedaulatan Rakyat*, hlm 13.
- Ditjen Dikti. 2003. *Higher Educational Long Term Strategy (DITJEN DIKTI) 2003-2010*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Kedaulatan Rakyat. 10 November, 2005. *Peringkat 56, UGM Unggulan Dunia*, hlm. 1.
- Koentjaraningrat, S. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas. 5 Maret, 2005. *ITB Berbisnis Menuju Universitas Riset*, hlm. 1.
- Menakertrans. 19 Desember, 2005. Pengangguran terus naik. *Kompas*, hlm.16.
- Paat, L. 7 Januari, 2006. Bila Tak Berubah, Bubarkan LPTK: Ilmu Kependidikan yang Diajarkan Sudah Usang. *Kompas*, hlm. 12.
- Sihombing, U. 2001. Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Dalam P. Jalal & D. Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (hlm. 190-195). Yogyakarta: Adicita.
- Slamet, M. 1998. Tuntutan Kualitas Unggulan pada SMK. *Kajian Depdikbud*, 4 (15): 51.
- Suhendro, B. 2004. Kebijakan Pendidikan Tinggi: Peran Negara dan Swasta dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Khusus 2004: 2.
- Sukartono, M. 9 April, 2004. Menyiapkan SDM Profesional dari Dunia PT. *Kedaulatan Rakyat*, hlm. 1.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- UNDP World Competitiveness Year Book (2003)*
- Yanto, B. 6 Oktober 2004. Mengurai Benang Kusut Pendidikan di Indonesia. *Kedaulatan Rakyat*, hlm 15.
- Zen, M.T. 31 Desember, 2005. Menjadi Bangsa Berdaya. *Kompas*, hlm. 6.